



PROMOSI DOKTOR

MUSPIDA SUYUTI

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SABTU, 15 DESEMBER 2007



MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMIRI RAKYAT DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN

LATAR BELAKANG

Hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros telah menarik perhatian banyak peneliti seperti, Yusran (2005), Supratman (2005), dan Alam (2007). Para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros adalah contoh praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang kompleks, dinamis, dan memiliki nilai-nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Pembangunan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros didasari oleh rasa saling percaya, jaringan, dan kelembagaan masyarakat yang terangkum dalam satu modal sosial dalam skala mikro yang kuat. Kebijakan Pemerintah (modal sosial dalam skala makro) dalam bentuk Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), menyebabkan sebagian besar lahan kemiri yang telah dibangun masyarakat masuk dalam kawasan hutan, yang berakibat melemahnya hak penguasaan lahan dan terbatasnya akses masyarakat untuk mengelola lahan kemiri dalam kawasan hutan.

TIM PROMOTOR :

Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M. Agr.
Dr. Ir. Darmawan Salman, MS.
Dr. Ir. Akhsan, MS.

MASALAH PENELITIAN

- Bagaimana keterkaitan antara modal sosial mikro dengan modal sosial makro dalam pembangunan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.
- Bagaimana akibat perubahan modal sosial makro terhadap pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.
- Bagaimana rumusan model penguatan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.

TUJUAN PENELITIAN

- Menggambarkan keterkaitan antara modal sosial mikro dengan modal sosial makro dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.
- Menjelaskan akibat dari perubahan modal sosial makro terhadap pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.
- Merumuskan model penguatan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian didapatkan bahwa pola keterkaitan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri didominasi oleh modal sosial mikro, yang ditunjukkan adanya saling percaya dan jaringan kerjasama antara petani dalam membangun hutan kemiri melalui tindakan terkoordinasi. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) merubah pola pengelolaan hutan kemiri yang diakibatkan oleh melemahnya status kepemilikan dan penguasaan lahan oleh masyarakat seperti diperlihatkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel Perubahan Unsur Modal Sosial dalam pengelolaan Hutan Kemiri.

Unsur Modal Sosial	Perubahan Modal Sosial	
	Sebelum TGHK	Setelah TGHK
1. Status Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan hak kepemilikan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan hak kepemilikan melalui izin pemerintah
2. Peralihan hak Pengelolaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Modal sosial <i>sanra</i> kuat • Modal sosial <i>teseng</i> kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Modal sosial <i>sanra</i> hilang • Modal sosial <i>teseng</i> melemah
3. Pemungutan hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengupahan dalam bentuk buah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengupahan dalam bentuk uang

KESIMPULAN

1. Hutan kemiri di Kabupaten Maros terbangun sebagai wujud dari keterkaitan modal sosial mikro dan modal sosial makro dalam bentuk saling percaya (*mutual trust*) dan jaringan (*networking*) secara bersama-sama melahirkan tindakan terkoordinasi membangun hutan kemiri. Dominasi modal sosial mikro (pengakuan masyarakat terhadap hak penguasaan lahan) dalam pengelolaan hutan kemiri sangat kuat menyebabkan masyarakat secara berkelompok membangun hutan kemiri.
2. Perubahan modal sosial makro dalam pengelolaan hutan kemiri berakibat pada melemahnya status penguasaan lahan masyarakat. Tindakan terkoordinasi secara bersama melalui penguatan kelompok pengelolaan lahan dan pemungutan hasil, dalam pencapaian tujuan bersama tidak dapat diwujudkan, karena modal sosial makro (TGHK) menyebabkan atau merenggangkan rasa saling percaya (*mutual trust*) dan jaringan (*networking*) yang dibangun masyarakat melalui modal sosial mikro. Hal ini bertentangan dengan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Serageldin dan Grootaert (1996).
3. Model penguatan modal sosial pengelolaan hutan kemiri diarahkan pada peningkatan kepastian hak pengelolaan, pengaturan peran serta masyarakat, penguatan *mutual trust* dan jaringan antara masyarakat dan pemerintah, serta implementasi dan pemberian akses pemanfaatan hutan pada masyarakat berdasarkan kesepakatan dan aturan yang berlaku, dengan tetap menjamin fungsi-fungsi hutan secara berkesinambungan.

SARAN

1. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat menguatkan modal sosial mikro.
2. Pemerintah Kabupaten Maros perlu merumuskan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta untuk memperkuat modal sosial mikro pengelolaan hutan kemiri.
3. Pemerintah Kabupaten Maros perlu menata kawasan hutan secara mikro untuk mengadaptasikan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan modal sosial mikro serta memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan lindung bagi masyarakat berdasarkan PP No 6 Tahun 2007 serta pemberian izin pemanfaatan hasil hutan berdasarkan Kepmen No P.23/Menhut-II/2007, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi-fungsi hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Desa Barugae Kecamatan Mallawa dan Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama (*qualitative dominant*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi.

Penguatan modal sosial masyarakat pengelola hutan kemiri dilakukan dengan memperbaiki kinerja modal sosial dalam bentuk mengintegrasikan setiap elemen modal sosial baik pada level makro maupun level mikro.

Tabel Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Aspek yang Mungkin Dirubah melalui Penguatan Modal Sosial Pengelolaan Hutan Kemiri

Dimensi Waktu	Aspek Perubahan menurut Tingkat Masyarakat (<i>Level of Society</i>) dalam Proses Penguatan Modal Sosial dalam pengelolaan hutan kemiri.	
	Mikro (Individu-Klp Kecil)	Makro (Masyarakat)
Jangka Pendek	Tipe 1 Kompetensi SDM: (1) Keterampilan (2) Kematangan emosional (3) Kerjasama mutualistik (4) Apresiasi nilai maju (5) Apresiasi organisasi, dan (6) Responsif terhadap kepemimpinan	Tipe 3 (1) Kepastian pengelolaan hutan kemiri (2) Penguatan status lahan hutan kemiri
Jangka Panjang	Tipe 2 (1) Mutual trust (2) Jaringan	Tipe 4 Adaptasi modal sosial pengelolaan hutan kemiri

